

Masjid Boleh Menggelar Solat Tarawih

SALATIGA (KR) - Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Salatiga, Muthoin yang juga Penjabat (Pj) Sekda Salatiga mengatakan pelaksanaan solat tarawih berjamaah di masjid di wilayah Salatiga diperbolehkan, meskipun saat ini masih dalam kondisi pandemi Covid-19. Jemaah solat tarawih diimbau agar menjalani protokol kesehatan (prokes) dengan ketat dan takmir diminta mengurangi kapasitas masjid sampai 50 persen untuk mencegah munculnya penularan baru virus korona. "Sesuai SE Walikota pelaksanaan solat tarawih di bulan Ramadan 2021 diperbolehkan dengan tetap menjaga diri dan waspada serta menerapkan prokes secara ketat demi kebaikan bersama," kata Muthoin, Selasa (30/3).

Muthoin juga mengatakan DMI Salatiga menurunkan tim relawan untuk ke masjid bersama tim marbot sekaligus memberikan edukasi mengenai prokes saat menjalankan jamaah solat tarawih di situasi pandemi. Selanjutnya untuk takmir bisa menyiapkan tempat khusus jamaah di luar warga sekitar yang kebetulan melintas dan ikut solat untuk bisa ikut berjamaah namun terpisah. "Satgas Covid-19 Salatiga akan melakukan pemantauan bersama takmir masjid," jelas Muthoin. Beberapa takmir masjid di Salatiga mulai menggelar rapat bersama untuk persiapan pelaksanaan solat tarawih berjamaah di masjid. "Diputuskan dilaksanakan solat tarawih berjamaah di masjid dengan menerapkan protokol kesehatan," kata Ketua Takmir Masjid Al Muhajirin, Perumahan Domas, Salatiga, Sumarno. (Sus)

Akun WA Bupati Klaten Dipalsukan

KLATEN (KR) - Dalam beberapa pekan terakhir beredar akun whatsapp (WA) mengatasnamakan Bupati Klaten Hj Sri Mulyani. Oknum yang menggunakan akun tersebut berpura-pura akan memberi dana bantuan pembangunan tempat ibadah. Nomor WA yang tertulis 081-333-xxx-xxx itu bahkan menggunakan foto profil Sri Mulyani untuk menipu orang. Amin Mustofa, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Klaten, Selasa (30/3/21) menegaskan, jika akun WA yang mengatasnamakan bupati dan akan memberi bantuan adalah palsu, bukan nomor milik Bupati Klaten. "Kami harap masyarakat berhati-hati dan tidak mudah mempercayai nomor WA tersebut. Kami pastikan nama Bupati Klaten Sri Mulyani dicatut untuk kepentingan pribadi. Saya mengklarifikasi nomor tersebut bukan nomor Bupati Klaten Sri Mulyani, biar pun menggunakan foto profil beliau. Kami masih mengumpulkan informasi terkait motif pelaku. Upaya hukum akan kami tempuh jika memang ada bukti pelanggaran," kata Amin Mustofa.

Amin Mustofa menjelaskan, Kasus pencatutan nama Bupati Klaten Sri Mulyani, terkait pesan pemberian bantuan pembangunan masjid terjadi di dua tempat berbeda. Pertama pelaku menghubungi takmir masjid Mansyurin di Desa Serenan, Juwiring dan lainnya di Joglo Baitul Makmur. Pelaku memerintahkan takmir masjid membuka rekening. Modus ini dilakukan pelaku diduga untuk menguras isi rekening kas takmir masjid dengan dalih meminta nomor rekening bank. Hal senada juga disampaikan Mujab, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Klaten. Menurutnya modus pelaku sama yakni mengaku sebagai Bupati Klaten yang mengatakan akan memberikan bantuan pembangunan masjid. "Kami memperoleh laporan Jumat (26/3) pekan kemarin. Pelaku mengaku Bupati Klaten Sri Mulyani. Menghubungi takmir masjid untuk membuka rekening dan mengatakan akan mentransfer sejumlah uang. Saya yang di Bagian Kesra Setda Klaten kebetulan mengurus sejumlah masjid pemerintah," jelas Mujab. (Sit)

Bandara A Yani Perketat Pengawasan dan Keamanan

SEMARANG (KR) - PT Angkasa Pura I (Persero) Kantor Cabang Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang melakukan peningkatan pengawasan dan keamanan di seluruh area bandara pasca teror bom yang terjadi di depan Gereja Cathedral Makassar, pada Minggu (28/3) lalu. "Manajemen PT Angkasa Pura I (Persero) Kantor Cabang Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang langsung meningkatkan pengawasan dan pengamanan. Hal itu dilakukan mengingat bandara merupakan objek vital negara sehingga perlu diantisipasi potensi ancaman lanjutan dari peristiwa teror bom di Makassar," ujar General Manager Bandara Jenderal Ahmad Yani, Hardi Ariyanto, Senin (29/3).

Peningkatan pengawasan dan keamanan dilakukan di seluruh bandara kelolaan Angkasa Pura 1 khususnya Bandara Jenderal Ahmad Yani, dengan meningkatkan pemeriksaan kendaraan yang akan masuk ke area bandara dan melakukan peningkatan random check di area sebelum pengambilan tiket parkir dan melibatkan pendampingan petugas TNI dan Polri yang telah diperbantukan.

Sepain itu juga melakukan patroli gabungan untuk pemeriksaan keamanan di area perimeter bandara, serta meningkatkan ketelitian petugas bandara dalam melakukan pemeriksaan terhadap orang atau petugas dan kendaraan yang memasuki area sisi udara (airside). Pemeriksaan secara konsisten di area Screening Check Point (SCP) dilakukan untuk memastikan calon penumpang yang masuk ke area sisi darat (land side) yang dikendalikan (check in area) dengan harus memperlihatkan travel document (tiket), identitas (KTP, SIM, dan lain-lain), serta karyawan diwajibkan memperlihatkan kartu identitas bandara (pas bandara). (Cha)



KR-Istimewa

Petugas security bandara dibantu otoritas pengamanan dari Penerbad TNI memeriksa kendaraan yang hendak masuk Bandara Internasional Jenderal A Yani Semarang.



BHABINKAMTIBMAS Brigadir Yudha bersama Lurah Peterongan Maria Sri Hastuti SE, selalu aktif terjun ke lingkungan untuk mengetahui situasi dan kondisi warganya melalui sambang warga. Bhabinkamtibmas Milenial Polrestabes Semarang ini menjadi idola anak-anak dan oleh Bu Lurah justru digunakan sebagai edukator protokol kesehatan (prokes) dalam penanggulangan virus korona. Pada Senin (29/3) saat keduanya meninjau lingkungan Pasar Peterongan, anak-anak pun menyapa dan mengerubuti pak polisi berwajah ganteng tersebut. Momentum ini digunakan untuk membina anak-anak menjadi leader prokes. "Kalau ada yang tidak pakai masker, diingatkan ya adik-adik. Mosok kalah sama adik-adik kecil yang taat menggunakan masker?," kata Brigadir Yudha.

KR-Chandra AN

SIKAPI POLEMIS PENUNDAAN PILKADES SERENTAK

Dinpermades Diminta Konsultasi ke Kemendagri

PURWOREJO (KR) - Polemik ditundanya pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2021 dari jadwal semula 3 Mei 2021 menjadi 9 Juni 2021, terus bergulir. Komisi I DPRD Purworejo memanggil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Perdesaan (Dinpermades) Purworejo dan Paguyuban Kepala Desa, Lurah, dan Perangkat Desa (Polosoro) Purworejo untuk klarifikasi, Senin (29/3).

DPRD meminta Dispermades berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna menelaah kembali penundaan itu. Ketua Komisi I DPRD Purworejo Tursiyati, mengatakan keputusan itu diambil karena DPRD dan pemkab tidak dapat mengambil keputusan secara gegabah untuk mengembalikan Pilkada ke jadwal lama. "Setelah didengarkan bersama, ada banyak hal yang harus dikaji dari sisi hukum dan regulasinya," ucapnya.

Komisi I, sepakat masih ada celah yang bisa dijadikan landasan bupati membuat diskresi agar Pilkada tidak jadi ditunda. Kelonggaran itu adalah belum diaturnya peristiwa yang menyebabkan tidak terpenuhinya syarat jumlah pendaftar dalam regulasi pemerintah pusat.

Komisi I DPRD, Dinpermades, dan Polosoro akan mengagendakan konsultasi pada minggu pertama April 2021. "Tapi Bupati belum berani membuat diskresi sebelum

ada jawaban konsultasi kami dengan Kemendagri," katanya. Pelaksanaan harian (Plh) Kepala Dinpermades Purworejo Ganis Pramudito menuturkan, konsultasi ke Kemendagri adalah solusi terbaik yang dapat dilakukan untuk menjawab polemik itu.

"Walau pun kami sudah konsultasi ke Pemerintah Provinsi yang notabene kepanjangan pemerintah pusat, kalau muncul aspirasi ke Kemendagri, kami siap mengikuti," terangnya. Selama menunggu konsultasi, tahapan Pilkada akan disesuaikan dengan penjadwalan yang baru, yakni pelaksanaan 9 Mei 2021.

Desa Sumbersari Banyuwirip yang satu dari dua balon kadensya meninggal dunia dan Benowo Bener yang balon kades tidak memenuhi syarat lokasi tes kesehatan, kembali membuka pendaftaran se-

lama 20 hari. Ganis menambahkan, Dinpermades tengah membuat rancangan Perbup untuk mengatur apabila terjadi peristiwa diluar kendali yang dapat menggagalkan pelaksanaan Pilkada.

Wakil Ketua Polosoro Sutanto mengemukakan, polemik muncul karena penundaan berdampak besar secara finansial, psikologis, hingga potensi gangguan sosial kemasyarakatan di desa. Setelah rapat klarifikasi, katanya, pelaksanaan Pilkada sesuai jadwal lama dengan meninggalkan dua desa juga bertentangan dengan regulasi.

"Kalau Pilkada sesuai jadwal lama dan dua desa tidak ikut itu melanggar regulasi, tapi jika seluruhnya ditunda, maka 41 desa lain yang akan merasakan dampak sosialnya. Sampai sekarang belum ada solusi terkait persoalan itu," ucapnya. (Jas)

Polres Boyolali Terapkan Tilang Elektronik



KR-Mulyawan

Iptu Widarto menunjukkan salah satu pelanggaran lalu lintas.

BOYOLALI (KR) - Peluncuran tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Tahap I secara nasional resmi diberlakukan pada Selasa (23/3). Sejak itu, telah diterapkan sistem yang mencatat, mendeteksi, dan memotret pelanggaran di jalan raya melalui kamera Closed-Circuit Television (CCTV).

Kepolisian Resort (Polres) Boyolali yang menerapkan sistem ETLE telah menindak pelanggaran. Ka-

polres Boyolali, AKBP Morry Ermond melalui Kepala Urusan Pembinaan Operasional (Kaur Binops) Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Boyolali Iptu menjelaskan di Kabupaten Boyolali terdapat dua titik yang memasang sistem ETLE, yang pertama di simpang empat Driyan, Kelurahan Siswodipuran, Kecamatan Boyolali. Wilayah ini dipasang sistem ETLE melalui CCTV karena dianggap sering terjadi kecelakaan la-

lu lintas. Kemudian yang kedua ditempatkan di simpang SMA BK Boyolali.

Berbagai bentuk pelanggaran tersebut dapat berupa pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm, melanggar garis marka jalan, serta pengendara roda empat tidak memakai sabuk pengaman.

Selain itu, dengan berlakunya ETLE, polisi lalu lintas hanya melaksanakan tugas-tugas yang bersifat mengurai kemacetan lalu lintas, serta menolong masyarakat yang mengalami kecelakaan.

Sementara untuk penegakan hukum yang selama ini berpotensi terjadinya kerawanan penyalahgunaan kewenangan bisa dihindari dengan memanfaatkan teknologi informasi yang sudah dilengkapi dengan Artificial Intelligence (AI) dan memanfaatkan data sehingga hasilnya bisa dipertanggungjawabkan secara presisi dan akurat. (*-1)

Unimus-USAID YEP Gelar Pelatihan FLS

SEMARANG (KR) - Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pengembangan Karir atau Unimus Career Development Center (UCDC) Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus) mengadakan Pelatihan Keterampilan Hidup berbasis Keuangan/ Financial Life Skills (FLS) guna memberikan pembekalan kepada mahasiswa dan alumni, agar memiliki keterampilan dalam mengambil keputusan yang tepat, mengatur perencanaan keuangan dengan baik, dan dapat berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. USAID YouthWin Through Economic Participation (USAID YEP) atau Pemuda Jaya melalui Partisipasi Ekonomi merupakan konsorsium perancang dan pelaksana Program Pelatihan Keterampilan Hidup Berbasis Keuangan di bawah inisiatif multi-program USAID KUNCI yang terfokus pada Pembangunan Tenaga Kerja Terinklusi (Inclusive Workforce Development Program). Dalam pelaksanaan Pelatihan Financial Life Skills ini, UCDC menggandeng BEM Universitas Muhammadiyah Semarang dengan mendatangkan USAID FLS Trainer Sukojo SS dan Patricia Suratno sebagai fasilitator.

"Saat ini berlangsung Batch 1 dengan peran aktif dan antusias dari peserta. Terbukti dengan kesan yang diungkapkan oleh salah satu peserta yaitu Mita Umiharithah yaitu banyak hal yang bisa diambil dan dia terapkan di kehidupan sehari-hari, salah satunya mengenai keuangan. Dalam kegiatan tersebut ada banyak materi yang membahas masalah keuangan, mulai dari cara menyusun dan membuatnya," ujar Sukojo. (Sgi)



KR-Sugeng Irianto

Sukojo SS

GANJAR PRANOWO CEK GUDANG BULOG

Temukan Penyerapan Gabah Petani Rendah

KLATEN (KR) - Gubernur Jateng Ganjar Pranowo meninjau gudang Bulog Banaran Delanggu Klaten. Pengecekan gudang bulog dilakukan Ganjar untuk mengetahui serapan gabah petani saat musim panen tiba. Ternyata serapan hasil panen petani oleh Bulog sangat kecil. Hal itu diungkapkan Ganjar Pranowo saat meninjau gudang Bulog Banaran Delanggu Klaten, Senin (29/3).

Didampingi Wakil Bupati Klaten, Yoga Hardaya dan Pemimpin Wilayah Bulog Jateng, Miftahul Ulum, Ganjar melihat stok beras yang ada di gudang itu. Selain menanyakan stok beras yang ada di gudang tersebut, Ganjar menanyakan serapan gabah petani selama musim panen ini. Miftahul Ulum mengatakan, Bulog Jateng

hanya dapat jatah menyerap 204.000 ton gabah dari petani. Ganjar menilai serapan tersebut terlalu kecil jika dibanding dengan hasil panen petani.

Menurut laporan Dinas Pertanian dan Perkebunan, sejak Januari hingga Mei mendatang, Jateng mengalami surplus beras sebanyak 1,6 juta ton. "Saya ke sini untuk melihat proses serapan, karena bulan April ini kita sedang peeksnya panen raya. Teman-teman di Bulog juga sudah mulai serap, tapi kalau kita bicara produksi kita, hari ini sangat melimpah. Maka penting memastikan gabah petani dibeli dengan harga di atas HPP atau minimal sama dengan HPP," kata Ganjar.

Gubernur juga menemukan adanya problem dari kunjungan tersebut, yakni

mekanisme penyerapan Bulog yang belum mendukung. Rendahnya penyerapan menurut Ganjar karena fungsi Bulog yang tidak optimal. Jika dulu Bulog punya program beras miskin (raskin), sekarang program itu tidak ada. "Ini diserap terus, tidak dikeluarkan. Paling keluar rutin dari Bulog hanya bencana atau operasi pasar (OP). Jadi mohon maaf, kalau tidak ada bencana atau harga stabil dan tidak ada operasi pasar, ya berasnya ndongkrok di gudang Bulog," tutur Ganjar Pranowo.

Ganjar mengusulkan kepada pemerintah pusat agar membuat kebijakan baru untuk membantu Bulog menyerap gabah petani. Bulog bisa diberikan tugas yang lebih banyak seperti dulu lagi. Sekarang

ini menurut Ganjar fungsi Bulog agak pincang. Disatu sisi mereka diminta nyerep gabah petani, tapi ke luarinya tidak banyak, sehingga hanya untuk stok saja.

Miftahul Ulum mengatakan, Bulog Jateng dijatah menyerap gabah petani sebanyak 204.000 ton tahun

ini. Bulog optimis target tersebut bisa tercapai, atau minimal di atas 75 persen dari target. Ini karena ada kendala Bulog dalam penyerapan gabah petani. Di antaranya kualitas gabah petani tidak terlalu bagus karena panen saat musim hujan. (Bdi/Sit)



KR-Budiono

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo memeriksa gudang Bulog di Klaten.